

Peranan Pendamping Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi

Deden Indrajaya^{1*}, Ahmad Hidayat²

^{1,2} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ khairan.indrajaya@gmail.com, ²ahmad.hidayat@stiami.ac.id

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history :

Received : Mei 16, 2025

Revised : Mei 19, 2025

Accepted : Mei 27, 2026

Keywords:

The Role;

Rural Assistance;

Development Planning



Copyright (c) 2026
Abiwarra : Jurnal Vokasi
Administrasi Bisnis

ABSTRACT

Village facilitators have a strategic role in ensuring that village development planning runs in accordance with the principles of participation, inclusiveness, and accountability. The village development planning meeting held annually serves as a guideline in designing development programs for the following year. However, in practice, there are still many development proposals that are not realized, and the level of community involvement in the planning process is still low. The presence of village facilitators aims to increase the capacity of village governments while encouraging active community participation in the development planning process. This research aims to analyze the role of village facilitators in village development planning. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews with relevant resource persons, as well as documentation and observation. The research location covers villages in Kecamatan Cibusah, Bekasi Regency. The results showed that village facilitators in Cibusah Sub-district have not played an optimal role in assisting village development planning. This is shown by the mismatch between development plans and realization, as well as the low level of community participation in the planning process. The main inhibiting factors include the lack of coordination between the village government and village facilitators, the low level of education of the community, and the strong culture that considers vulnerable groups to have no significant role in public decisionmaking. To improve the effectiveness of the role of village facilitators, efforts are needed to increase capacity through more intensive training, strengthen coordination with village governments, and change the mechanism of approaches to be more effective in educating and encouraging community participation in village development planning.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui alokasi Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa (Iswanto, 2018; Saptanti, 2020). Pemerintah pusat, melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah menggulirkan berbagai program prioritas untuk pembangunan kawasan perdesaan, salah satunya fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa. Implementasi pendekatan pembangunan partisipatif menjadi kunci, di mana perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap dengan harapan tercapainya efektivitas dan efisiensi. Dalam konteks ini, pendamping desa memegang peranan penting dalam mendampingi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di tingkat desa. Keberhasilan mereka dapat diukur dari kesesuaian antara perencanaan yang diusulkan dengan realisasinya di lapangan.

Kabupaten Bekasi menunjukkan tren positif dalam beberapa indikator makro pembangunan pada tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat, persentase penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan, sementara Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) stabil (Laporan Evaluasi Terhadap RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2023). Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory) dari Locke menekankan pentingnya tujuan yang spesifik dan menantang dalam meningkatkan kinerja, yang relevan dalam perencanaan pembangunan untuk menetapkan target yang terukur dan realistis (Muhfizar, dkk., 2021). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

menjadi forum penting untuk merumuskan rencana pembangunan daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, pada tahun 2022, usulan skala prioritas pembangunan melalui Musrenbang mencapai 70 usulan untuk tahun 2023. Namun, data realisasi pembangunan tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 24 usulan yang terealisasi (sekitar 34,29%). Kondisi ini mengindikasikan adanya disparitas antara perencanaan dan implementasi. Pendamping desa memiliki peran krusial sebagai katalisator dalam memastikan proses perencanaan pembangunan desa berjalan partisipatif, inklusif, dan akuntabel (Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015). Tugas pendamping desa meliputi pendampingan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa (Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2023). Di Kecamatan Cibarusah, dengan satu Pendamping Desa dan dua Pendamping Lokal Desa yang mendampingi tujuh desa, optimalisasi peran mereka menjadi penting.

Observasi awal di Kecamatan Cibarusah pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa belum berjalan optimal, tercermin dari realisasi yang tidak sesuai rencana dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan. Selain itu, ketidakselarasan antara usulan Musrenbang dan realisasi pembangunan di tingkat kecamatan juga menjadi perhatian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peranan pendamping desa berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat desa melalui perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.

Konsep peran juga dijelaskan sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status), di mana pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai status menandakan menjalankan peran. Status dan peran tidak dapat dipisahkan. Sutarto (dikutip Sambode, 2019) mengemukakan tiga komponen peran: konsepsi peran (kepercayaan individu), harapan peran (harapan orang lain), dan pelaksanaan peran (perilaku sesungguhnya). Keselarasan ketiga komponen ini penting dalam interaksi sosial. Ralph Linton menyatakan bahwa peran adalah aspek dinamis dari status, dan Tonny Nasdian Fredian (2014) menyebutkan bahwa pekerja pengembangan masyarakat dapat memiliki peran ganda sebagai enabler, organizer, atau educator. berbagai peran yang dimainkan oleh pekerja pengembangan masyarakat menurut Tonny Nasdian Fredian (2014).

Pendamping desa adalah seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat desa. Melalui program ini, dibutuhkan pendamping desa untuk melaksanakan pendampingan dengan mempekerjakan orang yang bertanggung jawab untuk membantu dan mendampingi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan pembentukan desa adalah meningkatkan kemampuan mengelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Syarat pembentukan desa meliputi faktor penduduk (minimal 2500 orang atau 500 KK), luas pelayanan dan pembinaan, jaringan komunikasi, serta sarana prasarana. Berbagai ahli memberikan pandangan berbeda tentang desa dari perspektif sosiologi, administrasi, politik, dan kebijakan. Unang Sunardjo mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat yang menetap di wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang kuat, susunan pengurus terpilih, kekayaan tertentu, dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan proses peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan infrastruktur (Suharto, 2010). Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola pembangunan secara partisipatif. Menurut Mardikanto (2015), pembangunan desa yang efektif memerlukan perencanaan berbasis

kebutuhan masyarakat, sehingga peran pendamping desa menjadi krusial dalam memfasilitasi proses tersebut.

Peran Pendamping Desa

Pendamping desa berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan motivator dalam perencanaan pembangunan (Kementerian Desa, 2016). Mereka bertugas membantu penyusunan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) melalui pendekatan partisipatif. Studi oleh Prasetyo (2018) menunjukkan bahwa pendamping desa yang kompeten mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran desa.

Pendekatan Partisipatif dalam Perencanaan Desa

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan desa (Chambers, 1994). Pendamping desa menggunakan metode Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) untuk mengakomodasi aspirasi warga. Penelitian di Jawa Barat oleh Wicaksono (2020) menemukan bahwa desa dengan pendamping yang aktif cenderung memiliki perencanaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Pendamping Desa

Meski memiliki peran strategis, pendamping desa sering menghadapi kendala seperti keterbatasan kapasitas, resistensi dari aparatur desa, dan minimnya anggaran pendampingan (Nugroho, 2019). Di Kecamatan Cibirusah, faktor geografis dan heterogenitas masyarakat menambah kompleksitas peran pendamping.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Moleong (dalam Muhajirin, 2024) mengenai pendekatan kualitatif adalah bahwa pendekatan ini berlandaskan pada fenomenologi dan konstruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pendekatan kualitatif memiliki sebelas karakteristik utama, termasuk penggunaan latar alamiah, menjadikan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif untuk pengumpulan data, analisis data secara induktif, penyusunan teori dari bawah ke atas (*grounded theory*), analisis deskriptif, fokus pada proses, pembatasan masalah berdasarkan fokus, penggunaan kriteria khusus untuk validasi data, desain penelitian yang fleksibel, dan hasil penelitian yang disepakati bersama dengan sumber data.

Fokus penelitian yang diteliti yakni masalah yang berhubungan dengan peranan pendamping desa dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi yang diketahui bahwa wilayah tersebut memiliki pendamping desa untuk mendampingi masyarakat desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data, antara lain wawancara individu, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip, serta penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi sasaran penelitian yakni anggota pendamping desa, kepala desa beserta struktur desa, Camat dan Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Urusan Perencanaan desa dan masyarakat yang ada di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi. Untuk memenuhi kebutuhan data yang beragam tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah Kecamatan Cibirusah memiliki luas 5.039 km², berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor di selatan dan Kabupaten Karawang di timur, menjadi wilayah dengan ketinggian rata-rata tertinggi di Kabupaten Bekasi, yaitu 50 - 135 meter diatas permukaan laut (dpl) dengan topografi sedikit berbukit. Kecamatan Cibirusah tidak memiliki kelurahan dan memiliki 7 (tujuh) desa terdiri dari 7 (tujuh) Desa yakni Desa Cibirusah Kota, Cibirusah Jaya, Sindangmulya, Wibawamulya, Sirnajati, Rodogalih dan Ridomanah. Berdasarkan data bahwa Kecamatan Cibirusah memiliki 63 Rukun Warga (RW) dan 244 Rukun Tetangga (RT). Tentunya Luas wilayah juga dapat mempengaruhi peranan pendamping desa dalam merencanakan pembangunan desa di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi. Secara umum kondisi sosial Kecamatan Cibirusah jika dilihat dari komposisi penduduk, dengan jumlah penduduk jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 52.213 dan perempuan 50.365 jiwa.

Tabel 1. Jumlah penduduk di Kecamatan Cibarusah

Desa/Kelurahan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
Sirnajati	5.211	5.088	10.299
Ridogalih	3.295	3.174	6.469
Rodomanah	1.647	1.591	3.238
Wibawamulya	5.837	5.676	11.513
Cibarusah Kota	9.362	9.130	18.492
Cibarusah Jaya	7.602	7.251	14.853
Sindangmulya	19.259	18.455	37.714
TOTAL	52.213	50.365	102.578

Dalam mengukur kemajuan dan kualitas hidup masyarakat dapat dilihat dari aspek pembangunan infrastruktur suatu wilayah dalam hal ini aksesibilitas terhadap fasilitas umum seperti jumlah sekolah, Pusat kesehatan masyarakat dan pasar. Pada tahun 2023 kecamatan Cibarusah kabupaten Bekasi memiliki sekolah Negeri sebanyak 37 Sekolah Dasar, 19 Sekolah Menengah Pertama, 8 Sekolah Menengah Atas, dan 10 Sekolah Menengah Kejuruan. Untuk fasilitas kesehatan 2 Rumah Sakit Umum dan 2 Puskesmas. Fasilitas umum lain yaitu 1 pasar dan fasilitas tempat ibadah terdiri 93 mesjid, 148 Mushola dan 1 Vihara.

Peranan Pendamping Desa Sebagai Facilitative Roles (Fasilitator)

Analisis konsistensi teori Fredian Tonny Nasdian terkait *Facilitative Roles* (Fasilitator) adalah bahwa pendamping desa di Kecamatan Cibarusah menunjukkan kontribusi yang signifikan sebagai fasilitator dalam memastikan perencanaan pembangunan desa berjalan secara partisipatif, terstruktur, dan efektif. Mereka berperan penting dalam mendukung musyawarah desa, menjembatani komunikasi, memastikan transparansi informasi, meningkatkan tata kelola pemerintahan desa, memperkuat kapasitas aparatur desa, dan mendorong partisipasi masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan peran ini, diperlukan evaluasi kinerja dan pelatihan khusus bagi pendamping desa agar mereka memiliki keterampilan yang memadai untuk terus memperkuat pembangunan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Peranan pendamping desa sebagai Educational Roles (Pendidik)

Berdasarkan *Educational Roles* (Pendidik) dalam teori Ferdian Tonny Nasdian adalah bahwa pendamping desa di Kecamatan Cibarusah telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengedukasi dan meningkatkan kapasitas serta partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat melalui pelatihan dan workshop yang berdampak positif pada peningkatan kapasitas pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, contohnya melalui pembentukan Tim 9. Namun, untuk memaksimalkan dampak peran edukatif mereka, pendamping desa perlu lebih aktif dan proaktif, terutama dalam forum strategis seperti MusrenbangDes, sehingga dapat memberdayakan masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Peranan pendamping desa sebagai Representational Roles (Utusan atau Wakil)

Peran pendamping desa sebagai *representational roles* (utusan atau wakil) di Kecamatan Cibarusah adalah bahwa efektivitas peran ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam forum MusrenbangDes. Rendahnya partisipasi masyarakat dan lambatnya penyusunan RKP-Desa mengindikasikan peran ini belum optimal. Meskipun demikian, terdapat kemajuan positif dalam bimbingan teknis penyusunan RKP-Desa. Untuk hasil yang lebih maksimal, diperlukan pendekatan yang lebih baik, sosialisasi yang lebih intensif, dan penguatan peran pendamping desa dalam mendorong partisipasi masyarakat dan mempercepat penyusunan dokumen perencanaan desa. Selain itu, kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap peran pendamping desa dan persepsi bahwa masukan mereka kurang solutif juga menghambat optimalisasi peran ini, sehingga peningkatan komunikasi, pemahaman, dan kolaborasi menjadi krusial.

Peranan pendamping desa sebagai *Technical Roles* (Teknikal)

Kesimpulan dari analisis indikator *Technical Roles* (Teknikal) dalam teori Ferdian Tonny Nasdian adalah bahwa pendamping desa di Kecamatan Cibirusah telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, terutama melalui sosialisasi dan dukungan terhadap teknologi. Namun, peran teknis ini belum optimal karena adanya kendala seperti pemahaman masyarakat terhadap teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan kapasitas pendamping desa. Meskipun telah berkontribusi pada pembangunan fisik dan penyusunan APBDes, upaya untuk mempermudah akses informasi publik dan inovasi partisipasi masyarakat secara luas masih perlu ditingkatkan.

Peran pendamping desa sebagai *Community Development* (Keterampilan Inti Pekerja).

Indikator *Community Development* (Keterampilan Inti Pekerja) dalam teori Ferdian Tonny Nasdian adalah bahwa pendamping desa di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi memiliki dasar pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mendukung perencanaan pembangunan desa. Namun, terdapat kekhawatiran mengenai kapabilitas mereka, terutama terkait latar belakang pendidikan formal yang dianggap kurang memadai, yang dapat memengaruhi kinerja mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, pembangunan, dan pengawasan desa. Meskipun pengalaman praktis menjadi keunggulan, penguatan kompetensi melalui pelatihan teknis dan teori yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan mereka dapat menghadapi tantangan pembangunan desa yang kompleks dan meningkatkan efektivitas peran mereka.

Faktor – faktor apa saja yang menjadi tantangan dan penghambat peranan pendamping desa dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi

Tantangan dan hambatan peranan pendamping desa di Kecamatan Cibirusah adalah sebagai berikut:

1. Tantangan utama adalah kurangnya dukungan dari pemerintah desa, yang mengakibatkan kurangnya koordinasi dengan pendamping desa. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan sebagian masyarakat desa menjadi kendala dalam menumbuhkan prakarsa dan partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan desa.
2. Hambatan signifikan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah budaya yang masih menganggap perempuan dan kelompok marjinal tidak memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan publik. Selain itu, sikap apatis warga yang merasa pembangunan bukan urusan mereka dan pesimis terhadap perubahan juga menghambat partisipasi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perubahan mekanisme atau pendekatan serta peningkatan kapasitas pendamping desa dalam mengedukasi dan mendorong partisipasi masyarakat.

Solusi yang dilakukan dari peranan pendamping desa dalam perencanaan pembangunan desa di kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi

Upaya untuk meningkatkan peranan pendamping desa di Kecamatan Cibirusah dalam perencanaan pembangunan desa adalah:

Mengatasi stigma sosial dan kurangnya keterlibatan kelompok rentan dengan:

1. Memanfaatkan media lokal dan teknologi informasi untuk sosialisasi dan motivasi partisipasi.
2. Beradaptasi dengan kebiasaan warga dalam merancang dan menyampaikan pelatihan.
3. Melibatkan masyarakat sejak awal perencanaan melalui diskusi kelompok dan komunikasi langsung.
4. Menyesuaikan materi pelatihan dengan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat.
5. Menggunakan metode praktis dan menarik, serta berkolaborasi dengan instansi pemerintah, universitas, dan LSM.

Mengatasi kurangnya dukungan dan koordinasi dari pemerintah desa dengan:

1. Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pemerintah desa tentang peran dan tanggung jawab pendamping desa melalui pelatihan dan sosialisasi.

2. Melakukan evaluasi sistem perekrutan calon pendamping desa dan pedoman pendampingan masyarakat desa oleh pemerintah pusat, termasuk mekanisme anggaran dan pengelolaan tenaga pendamping.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai peranan pendamping desa dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pendamping Desa di Kecamatan Cibirusah, Kabupaten Bekasi, belum menjalankan peranannya secara optimal dalam mendampingi perencanaan pembangunan desa. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa.
2. Belum optimalnya peran pendamping desa dalam pendampingan perencanaan pembangunan desa serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah desa, yang menyebabkan minimnya koordinasi antara pemerintah desa dan pendamping desa, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kuatnya budaya yang menganggap kelompok rentan tidak memiliki peran signifikan dalam pengambilan keputusan publik menjadi tantangan bagi pendamping desa dalam menumbuhkan prakarsa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
3. Untuk meningkatkan peranan pendamping desa, diperlukan upaya peningkatan kapasitas pendamping desa melalui pelatihan yang lebih intensif, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya, serta diperlukan upaya untuk mengubah mekanisme atau pendekatan yang dilakukan pendamping desa agar dapat lebih efektif dalam mengedukasi dan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih optimal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Saran

Di dasarkan pada indikator teori peranan dari Ferdian Tonny Nasdian, ada beberapa saran dan rekomendasi tentang peranan pendamping desa dalam perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Cibirusah kabupaten Bekasi yaitu sebagai berikut :

1. Pendamping desa di Kecamatan Cibirusah kabupaten Bekasi dalam menjalankan peranannya membantu perencanaan pembangunan desa dengan cara memberikan pembinaan dan bimbingan kepada pemerintah desa, khususnya kepada Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan Desa, dalam penyusunan dokumen perencanaan seperti RKPDes, RPJMDes, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan MusrenbangDes. Untuk memperkuat kapasitas Pendamping Desa diperlukan pelatihan tambahan bagi pendamping desa untuk meningkatkan kemampuan teknis, komunikasi, dan manajemen konflik.
2. Pendamping desa perlu membangun hubungan yang konstruktif dengan Pemerintah Desa serta menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah desa agar dapat bekerja sama secara sinergis. Pemerintah desa juga diharapkan memberikan ruang bagi pendamping desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya membantu perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya kepercayaan yang kuat, pendamping desa dapat lebih leluasa dalam memberikan masukan dan bimbingan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa.
3. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam MusrenbangDes, pendamping desa perlu mengoptimalkan strategi sosialisasi yang efektif dan mudah diakses. Hal ini dapat dilakukan melalui diskusi kelompok, media sosial, forum informal, serta pendekatan personal yang persuasif. Dengan melibatkan tokoh masyarakat, kelompok perempuan, dan pemuda, masyarakat akan merasa dihargai dan memiliki kepentingan bersama dalam pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Departemen Pendidikan Nasional, (2014) Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Imam. (2016). Jakarta : Metode penelitian kualitatif. PT. Bumi Aksara.
- Juliansyah Noor. (2017) cetakan 7. Jakarta. Metodologi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan karya ilmiah. Penerbit Kencana.
- Modul Praturgas PDP, PDTI, PLD oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Mudrajad Kuncoro. 2018. Jakarta. Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi. PT. Gramedia Pustaka Utama
- Muhfizar, (2021) Bandung : Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep), CV. Media Sains Indonesia.
- Nursapia Harahap. (2020). Medan : Penelitian Kualitatif. Wal Ashri Publishing.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumiaji sarosa, (2021) Yogyakarta : Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. Kanisius
- Syamsir, Torang, (2014) Bandung : Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), Alfabeta hlm, 86.
- Tonny. Nasdian. Fredian. (2014). *Pengembangan Masyarakat* (Cetakan Pertama). Yayasan Pustaka Obor. Jakarta.
- Wasistiono, Tahir. (2019), Tangerang Selatan : Administrasi Pemerintahan Desa. Universitas Terbuka.
- Winarni, Endang Widi. 2018. Teori Dan Praktek Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Journal of Public Policy and Management Fatmawati, dkk (2020), pembangunan desa mandiri melalui partisipasi masyarakat di kecamatan pattal lassang kabupaten gowa; <https://journal.unismuh.ac.id>.
- Jurnal Administrasi Negara Rizky A. Prasjo dan Luluk Fauziah (2015) yang berjudul “Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo”.
- Jurnal Binamulia Hukum Fakultas Hukum Universitas Suryadarma Vol. 7 No. 1, Juli 2018. Sugiman, Pemerintahan Desa.
- Jurnal DIMAS – Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018, dengan judul “Problematika Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidimpuan” jurnal DIMAS – Volume 18, Nomor 2, Nopember 2018.”
- Jurnal Governance Opinion Vol.7 Nomor 2 tahun 2022. Sitearo Ndruru, Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan desa.
- Jurnal Governance Opinion Vol.7 Nomor 2 tahun 2022. Sitearo Ndruru, Peranan Pendamping Desa Dalam Penguatan Pemerintahan desa.
- Jurnal Governance and Politic (JGP) M. Saleh Laha (2021) Peran Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Distrik Numfor Barat Kabupaten Biak Numfor: <https://jurnal.iyb.ac.id/index.php/jgp/article/download> 148/110.
- Jurnal INTEGRALISTIK No.1/Th. XXVIII/2017, dengan judul “Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa Dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri Di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.”

Jurnal Jurnal Administrasi Publik - Volume I, No. 6, Candra Kusuma Putra & Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Jurnal pendidikan Sosiologi Vol.3 Nomor 2 Irfan dan M.Tahir, Peran Pendamping Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri.